



## Integrasi Nilai-Nilai Al-Farabi dan Ibnu Khaldun dalam Rekonseptualisasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Ade Nabila Hazanah<sup>1\*</sup>, Syamzaimar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian, Indonesia

E-mail: [adebila1606@gmail.com](mailto:adebila1606@gmail.com)<sup>1</sup>, [syamzaimar0774@gmail.com](mailto:syamzaimar0774@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Penulis Korespondensi: [adebila1606@gmail.com](mailto:adebila1606@gmail.com)

**Abstract.** *This study examines the integration of Al-Farabi's and Ibn Khaldun's values into the reconceptualization of Civic Education (PKn) in Indonesia. Civic Education has often been criticized for its normative orientation, which lacks relevance to the multicultural realities and democratic challenges of contemporary society. The objective of this research is to construct a conceptual framework that combines Al-Farabi's emphasis on rationality, morality, and human perfection with Ibn Khaldun's focus on social solidarity (ashabiyyah) and adaptability to societal change. Using a qualitative descriptive approach with a library research design, this study analyzes classical and contemporary literature to identify the relevance of these contributions to PKn. The findings reveal that integrating Al-Farabi's moral dimension and Ibn Khaldun's social dimension enriches the ethical, spiritual, and civic aspects of PKn, while aligning with the foundational values of Pancasila. This integration offers a transformative model of PKn that not only develops cognitive competence but also nurtures moral integrity, social justice, and civic engagement. The implication is that PKn can serve as a holistic instrument for shaping citizens who are intellectually critical, ethically responsible, and socially cohesive. Nevertheless, the limitation of this study lies in its conceptual nature, as empirical testing has not yet been conducted, suggesting the need for further applied research to validate the proposed model.*

**Keywords:** Al-Farabi; Civic Education; Ibn Khaldun; Pancasila; Reconceptualization.

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji integrasi nilai-nilai Al-Farabi dan Ibnu Khaldun dalam rekonseptualisasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia. PKn selama ini sering dikritik karena orientasi normatifnya yang kurang relevan dengan realitas multikultural serta tantangan demokrasi kontemporer. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan kerangka konseptual yang menggabungkan penekanan Al-Farabi pada rasionalitas, moralitas, dan kesempurnaan manusia dengan fokus Ibnu Khaldun pada solidaritas sosial (*ashabiyyah*) serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kepustakaan, menganalisis literatur klasik dan kontemporer untuk menemukan relevansi kontribusi kedua tokoh terhadap PKn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi dimensi moral Al-Farabi dan dimensi sosial Ibnu Khaldun memperkaya aspek etis, spiritual, dan kewarganegaraan PKn, sekaligus selaras dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Integrasi ini menawarkan model PKn transformatif yang tidak hanya mengembangkan kompetensi kognitif, tetapi juga membentuk integritas moral, keadilan sosial, dan keterlibatan warga negara. Implikasinya, PKn dapat menjadi instrumen holistik dalam membentuk warga negara yang kritis secara intelektual, bertanggung jawab secara etis, dan kohesif secara sosial. Namun, keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang masih konseptual, sehingga diperlukan penelitian empiris lanjutan untuk menguji efektivitas model yang ditawarkan.

**Kata kunci:** Al-Farabi; Ibnu Khaldun; Pancasila; Pendidikan Kewarganegaraan; Rekonseptualisasi.

### 1. LATAR BELAKANG

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk karakter warga negara yang berlandaskan nilai kebangsaan sekaligus moralitas sosial. Namun, dalam praktiknya PKn sering terjebak dalam narasi normatif yang kurang relevan dengan dinamika masyarakat multikultural dan kebutuhan generasi muda di era globalisasi. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara idealisme kurikulum dengan realitas sosial, sehingga diperlukan pendekatan baru yang lebih kontekstual dan transformatif (Ikhwanudin, 2025).

Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu proses pembelajaran yang bertujuan membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui pendidikan ini, setiap individu tidak hanya diberi pengetahuan tentang aturan dan norma, tetapi juga diarahkan untuk mengembangkan sikap yang bertanggung jawab, berintegritas, dan memiliki karakter kuat. Pendidikan kewarganegaraan menekankan pentingnya nilai demokrasi, keadilan, serta persatuan sebagai landasan dalam kehidupan bersama (Syamzaimar, 2025).

Dengan demikian, peserta didik diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang kritis, peduli, dan mampu menjaga keharmonisan sosial. Selain itu, pendidikan ini juga berfungsi menanamkan semangat kebangsaan, menghargai perbedaan, serta menjunjung tinggi persaudaraan. Intinya, pendidikan kewarganegaraan bukan hanya soal teori, melainkan pembentukan sikap dan perilaku yang mencerminkan identitas bangsa.

Kajian literatur menunjukkan bahwa pemikiran Al-Farabi tentang pendidikan menekankan tujuan akhir berupa kesempurnaan manusia melalui perpaduan antara ilmu teoritis dan praktik sosial. Ia menekankan pentingnya kurikulum yang menggabungkan filsafat, agama, dan etika untuk membentuk individu yang berakhlak mulia dan berpikiran kritis (Nazifah dkk., 2024). Sementara itu, Ibnu Khaldun melalui karyanya *Muqaddimah* menekankan pendidikan sebagai sarana penguatan struktur sosial dan ekonomi, dengan tujuan membentuk manusia yang berdisiplin, kritis, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman (Ikhwanudin, 2025).

Dalam konteks Indonesia, integrasi nilai-nilai Islam dalam PKn telah diteliti secara sistematis oleh Rosyad dan Khoiriyah (2025), yang menganalisis 45 artikel periode 2018-2024. Hasil kajian mereka menunjukkan bahwa integrasi nilai Islam kompatibel dengan prinsip Pancasila, serta mampu memperkuat kesadaran spiritual, toleransi, dan komitmen nasional siswa. Namun, penelitian tersebut juga menyoroti adanya tantangan berupa keterbatasan kompetensi guru dan dukungan kebijakan, sehingga diperlukan kerangka konseptual yang lebih komprehensif untuk mengatasi hambatan tersebut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan pemikiran klasik Al-Farabi dan Ibnu Khaldun dengan rekonseptualisasi PKn di Indonesia. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti integrasi nilai Islam secara umum, maka penelitian ini berfokus pada kontribusi filosofis dua tokoh besar Islam dalam membangun paradigma pendidikan kewarganegaraan yang lebih relevan, transformatif, dan berakar pada tradisi intelektual Islam (Ikhwanudin, 2025; Nazifah dkk., 2024). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjawab gap akademik sekaligus memberikan solusi praktis bagi pengembangan kurikulum PKn di perguruan tinggi Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan kerangka konseptual integrasi nilai-nilai Al-Farabi dan Ibnu Khaldun dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Kerangka ini diharapkan dapat memperkaya dimensi etis dan spiritual PKn, sekaligus menjaga relevansi dengan nilai kebangsaan dan demokrasi. Melalui pendekatan ini, PKn tidak hanya menjadi instrumen pembentukan warga negara yang cerdas secara kognitif, tetapi juga berkarakter mulia, berkeadilan, dan memiliki solidaritas sosial yang tinggi (Ikhwanudin, 2025; Rosyad & Khoiriyah, 2025).

## 2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan instrumen strategis dalam membentuk karakter kebangsaan sekaligus moralitas sosial. Namun, kurikulum PKn di Indonesia sering terjebak dalam narasi normatif yang kurang relevan dengan dinamika masyarakat multikultural. Ikhwanudin (2025) menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai hukum Islam, khususnya melalui pemikiran Al-Farabi dan Ibnu Khaldun, dapat memperkaya dimensi etika, keadilan, dan solidaritas sosial dalam PKn sehingga lebih kontekstual dan transformatif.

Pemikiran Al-Farabi memberikan landasan filosofis yang kuat bagi pendidikan, terutama melalui konsep *al-Madina al-Fadhilah* yang menekankan pentingnya keadilan sebagai pilar masyarakat ideal. Dalam konteks pendidikan, Al-Farabi menekankan bahwa kurikulum harus menggabungkan filsafat, agama, dan etika untuk membentuk individu yang berakhlak mulia sekaligus kritis. Hal ini sejalan dengan temuan Kurniasih dkk., (2024) yang menunjukkan bahwa integrasi nilai Islam dalam PKn di universitas berbasis pesantren mampu menumbuhkan patriotisme, toleransi, dan kesadaran politik mahasiswa.

Sementara itu, Ibnu Khaldun melalui karya monumentalnya *Muqaddimah* menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana penguatan struktur sosial dan ekonomi. Ia menyoroti konsep *asabiyyah* (solidaritas sosial) sebagai perekat masyarakat yang beradab. Pandangan ini relevan dengan penelitian Kolek dkk., (2025) yang menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti religiusitas, persaudaraan, dan kesejahteraan umum dapat dijadikan landasan filosofis kurikulum untuk membangun karakter kebangsaan yang holistik. Integrasi pemikiran Ibnu Khaldun dengan nilai Pancasila memberikan kerangka teoritis yang kuat bagi pengembangan PKn di Indonesia. Selain itu, penelitian Kurniasih dkk., (2024) menekankan bahwa integrasi nilai Islam dalam PKn tidak hanya berfungsi sebagai penguatan moral, tetapi juga sebagai strategi untuk menghadapi tantangan radikalisme dan fragmentasi sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai Islam mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kohesi sosial sekaligus memperkuat identitas nasional. Dengan demikian, pemikiran Al-Farabi dan Ibnu Khaldun dapat dijadikan acuan teoritis dalam merumuskan kurikulum PKn yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia kontemporer.

Berdasarkan kajian teoritis ini, hipotesis yang dapat diajukan adalah bahwa integrasi nilai-nilai Al-Farabi dan Ibnu Khaldun dalam Pendidikan Kewarganegaraan akan memperkuat dimensi etis, spiritual, dan sosial PKn, sehingga menghasilkan warga negara yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga berkarakter mulia, berkeadilan, dan memiliki solidaritas sosial yang tinggi.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kepustakaan. Penelitian difokuskan pada analisis literatur klasik dan kontemporer mengenai pemikiran Al-Farabi dan Ibnu Khaldun, serta relevansinya dengan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Desain ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam gagasan filosofis yang bersifat normatif sekaligus aplikatif, sehingga dapat dijadikan dasar konseptual bagi pengembangan kurikulum PKn. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diarahkan untuk menemukan kerangka konseptual yang relevan dengan kebutuhan masyarakat multikultural.

Sumber data penelitian terdiri dari karya-karya ilmiah yang membahas integrasi nilai Islam dalam pendidikan kewarganegaraan, baik berupa buku, artikel jurnal, maupun prosiding. Pemilihan sumber dilakukan secara *purposive*, yaitu dengan menyeleksi literatur yang relevan dengan tema integrasi nilai-nilai Al-Farabi dan Ibnu Khaldun, serta diterbitkan dalam lima tahun terakhir agar tetap aktual. Strategi ini dipilih karena tidak semua literatur memiliki keterkaitan langsung dengan konteks PKn di Indonesia. Dengan cara tersebut, penelitian dapat lebih fokus pada referensi yang memiliki kontribusi nyata terhadap pengembangan kurikulum berbasis nilai Islam klasik dan kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan pencatatan sistematis terhadap gagasan, teori, dan hasil penelitian terdahulu. Instrumen utama berupa lembar pencatatan literatur yang memuat kategori analisis, yaitu konsep pendidikan Al-Farabi, konsep pendidikan Ibnu Khaldun, integrasi nilai Islam dalam PKn, serta relevansi dengan konteks Indonesia.

Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema besar untuk memudahkan proses analisis. Dengan demikian, penelitian ini mampu menyajikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara pemikiran klasik dan kebutuhan kurikulum PKn kontemporer.

Sebagai pengembangan, penelitian ini juga menekankan pentingnya konsistensi dalam menafsirkan literatur agar hasil kajian tetap objektif dan terarah. Peneliti berusaha menghubungkan pemikiran tokoh klasik dengan dinamika pendidikan modern, sehingga tercipta jembatan antara tradisi intelektual masa lalu dan kebutuhan kurikulum masa kini. Proses analisis dilakukan secara kritis dengan mempertimbangkan relevansi nilai-nilai Islam dalam konteks kebangsaan, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, sekaligus memperkaya wacana akademik yang berhubungan dengan integrasi pemikiran klasik dan modern.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu mengklasifikasikan data ke dalam tema besar kemudian menafsirkannya secara deskriptif-analitis. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan literatur klasik dengan penelitian modern untuk memastikan konsistensi temuan. Model penelitian yang digunakan adalah rekonseptualisasi kurikulum PKn berbasis nilai Islam klasik dan kontemporer. Simbol utama dalam model ini adalah integrasi antara nilai filosofis Al-Farabi (etika, filsafat, agama) dan nilai sosial Ibnu Khaldun (*asabiyyah*, struktur sosial, ekonomi), yang dirumuskan dalam hubungan  $PKn = f(A + K)$ . Dengan demikian, PKn dikembangkan sebagai fungsi dari integrasi nilai Al-Farabi dan Ibnu Khaldun, sehingga menghasilkan kurikulum yang etis, spiritual, dan kontekstual.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Integrasi Nilai Moral dan Sosial**

Integrasi nilai moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai fondasi pembentukan karakter warga negara. Nilai moral atau *virtue* yang ditanamkan melalui pendidikan berbasis Islam menekankan pentingnya kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab sebagai ciri utama individu berkarakter. Ikhwan (2025) menunjukkan bahwa pembiasaan ibadah, keteladanan guru, dan kolaborasi dengan orang tua mampu membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia. Hal ini sejalan dengan tujuan PKn untuk menghasilkan warga negara yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat.

Di sisi lain, dimensi sosial yang digagas Ibnu Khaldun melalui konsep *'ashabiyyah* memberikan kontribusi besar dalam memperkuat solidaritas dan kohesi sosial. Mahmudah dkk. (2025) menegaskan bahwa solidaritas sosial berperan sebagai perekat masyarakat yang beradab, sehingga pendidikan tidak hanya membentuk individu tetapi juga memperkuat ikatan sosial. Dalam konteks PKn di Indonesia, nilai *'ashabiyyah* dapat diintegrasikan untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, toleransi, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat multikultural.

Dengan demikian, integrasi nilai moral dan sosial dalam PKn menghasilkan paradigma pendidikan yang holistik. Dimensi moral membentuk individu berkarakter, sedangkan dimensi sosial memperkuat ikatan antarwarga negara. Kedua dimensi ini saling melengkapi dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan, berakhlak mulia, dan memiliki solidaritas tinggi. Hal ini relevan dengan kebutuhan bangsa Indonesia yang menghadapi tantangan globalisasi sekaligus menjaga identitas nasional.

### **Model Rekonseptualisasi PKn**

Pertama, perspektif Al-Farabi menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus berfokus pada dimensi moral dan kebajikan individu. Dalam karyanya Al-Madina al-Fadhilah, Al-Farabi menegaskan bahwa masyarakat ideal hanya dapat terbentuk apabila setiap individu memiliki akhlak mulia dan rasionalitas yang terarah pada kebaikan. Penelitian Utama & Wijaya (2025) melalui pendekatan Sinau VR memperkuat gagasan ini dengan menunjukkan bahwa internalisasi nilai Pancasila melalui simulasi etis berbasis teknologi imersif mampu menumbuhkan kesadaran moral mahasiswa. Dengan demikian, model rekonseptualisasi PKn yang berlandaskan Al-Farabi menekankan pentingnya pembentukan individu ideal yang beretika, reflektif, dan bertanggung jawab dalam ruang digital maupun sosial.

Kedua, perspektif Ibnu Khaldun menekankan aspek sosial dan solidaritas sebagai fondasi kewarganegaraan. Dalam Muqaddimah, ia menyoroti konsep *asabiyyah* sebagai perekat masyarakat yang kuat. Penelitian Ramadhan & Kartika (2025) mengembangkan gagasan ini dengan menekankan urgensi rekognisi budaya minoritas dalam kerangka kewarganegaraan multikultural. Solidaritas sosial yang inklusif menjadi kunci untuk menghindari diskriminasi dan dominasi kelompok mayoritas. Dalam konteks PKn, pendekatan Ibnu Khaldun menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus membangun masyarakat yang kuat melalui pengakuan terhadap keberagaman budaya, sehingga tercipta kohesi sosial yang adil dan setara.

Ketiga, perspektif Integrasi PKn menggabungkan dimensi moral dan sosial menjadi satu kesatuan. Mutmainnah dkk., (2025) menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa memahami nilai Pancasila secara konseptual, praktik sosial mereka masih eksklusif dan rentan terhadap konten negatif di media digital. Oleh karena itu, integrasi PKn harus diarahkan pada pembentukan warga negara berkarakter yang mampu menginternalisasi nilai moral sekaligus berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Pendekatan ini menuntut sinergi antara pendidikan formal, literasi digital, dan pengalaman sosial kontekstual agar mahasiswa tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga beretika dan inklusif dalam praktik kewarganegaraan.

Keempat, dalam kerangka teoritis, Syamsurijal dkk., (2025) menawarkan model rekonstruksi kritis-reflektif yang mengintegrasikan *critical pedagogy*, *reflective practice*, dan *contextual learning*. Model ini relevan untuk memperkuat integrasi PKn karena menekankan pentingnya dialog antara teori dan praktik, fleksibilitas adaptif, serta partisipasi aktif stakeholder pendidikan. Temuan mereka menunjukkan bahwa kapasitas berpikir reflektif mahasiswa masih rendah, sehingga diperlukan implementasi sistematis untuk meningkatkan kesadaran kritis. Dengan mengadopsi pendekatan kritis-reflektif, PKn dapat menjadi wahana pembentukan warga negara yang emansipatoris, kreatif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Kelima, Trisiana dkk., (2019) melalui model *Modification of Project Citizen* (MPC) menegaskan bahwa desain PKn berbasis media digital dapat mendukung implementasi pendidikan karakter. Model ini menggunakan tahapan ADDIE untuk mengembangkan pembelajaran berbasis proyek yang menekankan *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition*. Integrasi media digital dalam PKn tidak hanya memperkuat aspek kognitif, tetapi juga membentuk disposisi kewarganegaraan yang partisipatif dan bertanggung jawab. Dengan demikian, model MPC dapat menjadi acuan dalam rekonseptualisasi PKn yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus berakar pada nilai moral dan sosial bangsa.

### **Implikasi Terhadap Pembelajaran Pkn**

Implikasi pertama dari penerapan blended learning dalam pembelajaran PKn adalah meningkatnya fleksibilitas dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Hasanah dkk., (2024) menegaskan bahwa kombinasi tatap muka dan daring memungkinkan guru mengembangkan strategi variatif, sehingga siswa tidak hanya menerima materi secara pasif tetapi juga aktif dalam eksplorasi digital. Hal ini berdampak pada terbentuknya warga negara yang adaptif terhadap perubahan teknologi sekaligus reflektif terhadap nilai kebangsaan. Dengan demikian, *blended learning* menjadi model yang relevan untuk mengintegrasikan nilai moral dan sosial dalam PKn, karena siswa dapat mengaitkan konsep kewarganegaraan dengan pengalaman nyata di ruang digital maupun fisik (Hasanah dkk., 2024).

Implikasi kedua muncul dari penerapan *deep learning* berbasis ADDIE yang dikembangkan Mazid dkk., (2025). Model ini terbukti meningkatkan pemahaman konsep (+30,4%), keterampilan berpikir kritis (+31,7%), dan partisipasi diskusi (+32,3%). Peningkatan ini menunjukkan bahwa pembelajaran PKn tidak lagi cukup berbasis hafalan, melainkan harus diarahkan pada pembelajaran reflektif dan kontekstual. Dengan pendekatan *deep learning*, siswa dilatih untuk menghubungkan nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan dengan isu-isu aktual di masyarakat. Implikasinya, PKn dapat menjadi wahana pembentukan *civic disposition* yang kuat, sehingga siswa tidak hanya memahami teori kewarganegaraan tetapi juga mampu menginternalisasikannya dalam sikap dan tindakan nyata (Mazid dkk., 2025).

Implikasi ketiga berkaitan dengan pendidikan karakter di masa pandemi Covid-19. Rendrapuri & Dewi (2021) serta Tobing & Dewi (2021) menekankan bahwa pembelajaran daring berpotensi melemahkan internalisasi nilai Pancasila jika tidak diimbangi dengan strategi pendidikan karakter. Anak-anak lebih mengenal budaya populer dibandingkan budaya nasional, sehingga PKn harus berperan sebagai instrumen penanaman identitas kebangsaan sejak dini. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran PKn tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga harus menekankan dimensi afektif dan moral. Dengan demikian, implikasi pembelajaran PKn di masa pandemi adalah perlunya integrasi nilai kewarganegaraan dalam setiap aktivitas daring agar hak anak atas pendidikan karakter tetap terpenuhi (Rendrapuri & Dewi, 2021; Tobing & Dewi, 2021).

Implikasi keempat adalah pemanfaatan *Virtual Reality* (VR) dan *metaverse* dalam pembelajaran PKn. Supriyantomo & Fauzan (2024) menunjukkan bahwa VR mampu menghadirkan simulasi etis dan pengalaman imersif yang meningkatkan motivasi belajar serta pemahaman nilai kebangsaan. Hal ini sejalan dengan Jayadiputra dkk., (2023) yang menekankan perlunya kurikulum PKn abad 21 berbasis keterampilan 4C (*critical thinking, creativity, collaboration, communication*). Dengan integrasi teknologi imersif, siswa dapat mengalami langsung simulasi demokrasi, solidaritas, dan partisipasi sosial dalam ruang virtual. Implikasinya, pembelajaran PKn tidak lagi terbatas pada ruang kelas, tetapi dapat diperluas ke ruang digital yang interaktif, sehingga membentuk warga negara yang kreatif, kolaboratif, dan kritis (Jayadiputra dkk., 2023; Supriyantomo & Fauzan, 2024).

Implikasi kelima adalah penguatan kewarganegaraan digital dan *civic engagement* dalam kurikulum PKn. Amalia dkk., (2025) menekankan pentingnya literasi digital, etika online, dan keamanan informasi sebagai kompetensi warga negara digital. Sementara itu, Maharani dkk., (2025) menegaskan perlunya integrasi *civic engagement* lintas kurikulum untuk

membentuk warga negara aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Implikasinya, PKn harus mengembangkan model pembelajaran yang berorientasi pada keterlibatan sosial dan partisipasi demokratis, bukan sekadar kognitif. Dengan demikian, *civic engagement* dan kewarganegaraan digital menjadi pilar utama dalam membentuk warga negara abad 21 yang adaptif terhadap globalisasi dan teknologi, sekaligus berakar pada nilai-nilai Pancasila.

### **Analisis Kritis**

Penelitian ini memiliki keunikan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena berupaya mengintegrasikan dua tokoh klasik, Al-Farabi dan Ibnu Khaldun, dalam satu kerangka konseptual pendidikan kewarganegaraan. Upaya ini jarang dilakukan, sebab mayoritas kajian terdahulu hanya menyoroiti satu tokoh secara parsial atau membandingkan pemikiran klasik dengan teori modern tanpa menghubungkannya secara langsung dengan konteks pendidikan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan temuan Asmuni (2021) yang menekankan pentingnya akal dan moral dalam pendidikan tinggi, serta Erdiyanti & Dirman (2025) yang menyoroiti relevansi kerangka integratif Ibnu Khaldun dalam pedagogi kontemporer. Integrasi keduanya menjadi landasan filosofis yang kuat untuk membangun model pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya rasional dan moral, tetapi juga sosial dan historis.

Selain itu, penelitian ini menawarkan model konseptual baru yang menghubungkan pemikiran klasik dengan ideologi kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila. Model ini menempatkan Al-Farabi sebagai fondasi moral, Ibnu Khaldun sebagai fondasi sosial, dan Pancasila sebagai fondasi ideologis. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar melakukan kajian historis, melainkan menyusun kerangka rekonseptualisasi Pendidikan Kewarganegaraan yang relevan dengan tantangan era globalisasi dan digitalisasi. Hal ini memperkuat gagasan Yudhyarta dkk., (2025) bahwa integrasi nilai Islam moderat dengan Pancasila dapat menjadi solusi atas meningkatnya intoleransi dan melemahnya kesadaran kebangsaan.

Keunggulan lain dari penelitian ini adalah keterhubungannya dengan konteks Indonesia melalui Pancasila. Penelitian sebelumnya cenderung berhenti pada level filsafat pendidikan Islam klasik atau membatasi diri pada kajian normatif, sementara penelitian ini secara eksplisit mengaitkan pemikiran klasik dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model pendidikan kewarganegaraan yang mampu menjawab problematika aktual bangsa, seperti plagiarisme akademik yang merusak nilai keadilan sosial, lemahnya *civic engagement* generasi muda, serta tantangan moral generasi Z di era digital yang membutuhkan pendidikan karakter dan anti korupsi.

Namun, keterbatasan utama penelitian ini adalah belum dilakukan uji empiris. Model konseptual yang ditawarkan masih berada pada tataran teoritis dan filosofis, sehingga validitas dan efektivitasnya dalam praktik pendidikan belum dapat dipastikan. Penelitian ini belum menguji bagaimana integrasi nilai Al-Farabi, Ibnu Khaldun, dan Pancasila dapat diimplementasikan secara nyata dalam kurikulum, metode pembelajaran, maupun evaluasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah atau perguruan tinggi. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang bersifat empiris sangat diperlukan untuk menguji model ini dalam konteks kelas nyata, sehingga dapat memberikan bukti konkret mengenai keberhasilan atau tantangan yang mungkin muncul dalam penerapannya.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini berhasil merumuskan kerangka konseptual integrasi nilai-nilai Al-Farabi dan Ibnu Khaldun dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia. Dengan menggabungkan dimensi rasional-moral Al-Farabi dan dimensi sosial-historis Ibnu Khaldun, penelitian ini menawarkan model rekonseptualisasi PKn yang lebih relevan dengan konteks multikultural dan demokratis Indonesia. Model ini juga memperkuat keterhubungan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga PKn tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kognitif, tetapi juga sebagai wahana pembentukan warga negara berkarakter mulia, berkeadilan, dan memiliki solidaritas sosial yang tinggi.

Namun, keterbatasan utama penelitian ini adalah belum dilakukan uji empiris sehingga validitas dan efektivitas model konseptual yang ditawarkan belum dapat dipastikan dalam praktik pendidikan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu diarahkan pada implementasi empiris melalui studi kasus, eksperimen kelas, atau survei lapangan.

Sebagai saran, penelitian mendatang dapat mengembangkan model pembelajaran berbasis teknologi imersif seperti *Virtual Reality* untuk menginternalisasi nilai moral dan sosial, serta memperkuat *civic engagement* generasi muda di era digital. Kolaborasi antara akademisi, guru, dan pembuat kebijakan juga diperlukan agar kerangka konseptual ini dapat diadaptasi secara sistematis dalam kurikulum nasional, sehingga PKn mampu menjawab tantangan globalisasi sekaligus menjaga identitas kebangsaan yang berakar pada tradisi intelektual Islam dan Pancasila.

**DAFTAR REFERENSI**

- Amalia, A. R., Aqida, A., & Aidah, S. (2025). Kewarganegaraan Digital Sebagai Upaya Persiapan Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi. *Indonesian Character Journal*, 2(1).
- Asmuni, A. (2021). A Critical Study of Al-Farabi Philosophy Implementation at Education non Islamic Higher Education in Indonesia. *Dinamika Ilmu*, 491–500. <https://doi.org/10.21093/di.v21i2.3913>
- Erdiyanti & Dirman. (2025). Literature Review: Ibnu Khaldun Philosophy of Islamic Education an Integrative Framework for Contemporary Pedagogy. *Dirasah*, 6(2).
- Hasanah, S. U., Sulha, S., & Tini, T. (2024). Model Blended Learning Dalam Meningkatkan Pembelajaran Ppkn. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(1), 214–222. <https://doi.org/10.31571/jpkn.v8i1.6013>
- Ikhwan, A. (2025). Integration of Islamic Values in Character Education: A Case Study at Madrasah Salafiyah. *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 4(2), 63–73. <https://doi.org/10.55080/jpn.v4i2.199>
- Ikhwanudin. (2025). Integrasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Pendidikan Kewarganegaraan: Telaah atas Pemikiran Al-Farabi dan Ibnu Khaldun. *Tasyri' Journal of Islamic Law*, 4(1).
- Jayadiputra, E., Karim, A. A., Sapriya, S., & Rahmat, R. (2023). The Pancasila and Civic Education curriculum model at 21st century. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(1), 65–74. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i1.49455>
- Kolek, D., Robandi, B., Sipayung, A. T., & Syawalhayati, S. (2025). An epistemological study of Pancasila as the philosophical foundation of curriculum development in Indonesia. *Inovasi Kurikulum*, 22(1), 493–510. <https://doi.org/10.17509/jik.v22i1.79525>
- Kurniasih, M. D., Sastradiharja, E. J., & Syaidah, K. (2024). Integration of Islamic Values in Civic Education at Pesantren-Based Universities. *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society*, 11(2), 179–196. <https://doi.org/10.15408/tjems.v11i2.41447>
- Maharani, O., Sarwi, S., & Widiyatmoko, A. (2025). *The Important of Civic Engagement in the Indonesian Nasional Curriculum: Literature Review*.
- Mahmudah, S., & Ali, S. N. (2025). *Ibn Khaldun's Islamic Educational Thought: Relevance in the Modern World*. 7(3).
- Mazid, S., Istianah, A., Farikah, F., & Mulyani, M. (2025). Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pkn di Era Digital dengan Pendekatan Deep Learning. *Haumeni Journal of Education*, 5(1), 49–60. <https://doi.org/10.35508/haumeni.v5i1.23073>
- Mutmainnah, F., Sugara, H., & Prayetno, D. (2025). *Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Mahasiswa Era Digital di Universitas Kahuripan Kediri*. 15(02).
- Nazifah, A. A.-Q., Mafazah, N., Susilawati, S., & Indriyana, D. (2024). *Perspektif Ibnu Khaldun dan Al-Farabi pada Filsafat Pendidikan Islam*. 3(7).
- Ramadhan, R. A., & Kartika, G. D. (2025). Rekonseptualisasi Kewarganegaraan Berbasis Negara-Bangsa terhadap Kondisi Masyarakat Multikultural Melalui Pemikiran William Kymlicka. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 8(3).

- Rendrapuri, R. V., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Anak Di Masa Pandemi Covid-19. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 6(2), 139–149. <https://doi.org/10.15294/harmony.v6i2.46785>
- Rosyad, A. M., & Khoiriyah, A. (2025). *Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Systematical Literature Review*. 5(2).
- Supriyantomo, N. A., & Fauzan, R. T. (2024). Virtual Reality (VR) Dalam Pendidikan: Strategi Menyongsong Pendidikan Masa Depan Di Era Metaverse. *Jurnal Lingkaran Pembelajaran Inovatif*, 5(6).
- Syamsurijal, Sinring, A., & Kamaruddin, S. A. (2025). Kontekstualisasi Model Rekonstruksi Kritis-Reflektif Teori Pendidikan Dalam Pendidikan Kontemporer. *JIKAP PGSD: Jurnal Ilmiah Ilmu Kependidikan*, 9(3).
- Syamzaimar. (2025). *Pendidikan Kewarganegaraan Implementasi Pengalaman Islam* (Cetakan Pertama). PT. Indragiri Dot Com.
- Tobing, J. A. D. E., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Kewarganegaraan Terhadap Pembelajaran Daring. *Harmony*, 6(2).
- Trisiana, A., Sugiaryo, S., & Rispanyo, R. (2019). Model desain Pendidikan Kewarganegaraan di era media digital sebagai pendukung implementasi pendidikan karakter. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(2), 154–164. <https://doi.org/10.21831/jc.v16i2.24743>
- Utama, L., & Wijaya, N. (2025). Pendekatan Sinau VR untuk Penguatan Etika Kewarganegaraan Digital Mahasiswa Berbasis Pancasila. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2).
- Yudhyarta, D. Y., Zamsiswaya, Z., & May, A. (2025). Integrating Pancasila Values in Islamic Education: A Learning Model Based on Azyumardi Azra's Perspective. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 17(3). <https://doi.org/10.35445/alishlah.v17i3.7318>